



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah Nomor 10, Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman,
Kota Banda Aceh, Aceh 23242, www.pt-nad.go.id, pt.bandaaceh@gmail.com

Nomor : 3204/KPT.W1-U/OT1.6/XII/2025 Banda Aceh, 22 Desember 2025
Lampiran : 2 Lembar
Perihal : Penyusunan dan Penyampaian
Dokumen SAKIP

Yth. Ketua Pengadilan Negeri
Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 24 November 2025 hal pada pokok surat dan mempedomani Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dan Panduan Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Dan Pengadilan Negeri Di Wilayah Hukumnya, maka diminta setiap Pengadilan Tingkat Pertama se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk menyusun Dokumen SAKIP yang terdiri dari:

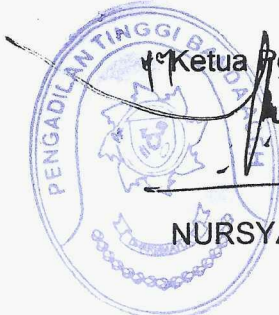
1. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025– 2029;
3. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2026;
4. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2027;
5. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026;
6. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026;
7. Laporan Kinerja Tahun 2025.

Ketentuan pengiriman dokumen SAKIP sebagai berikut :

1. Melalui pos dan diterima di Pengadilan Tinggi Banda Aceh paling lambat 28 Februari 2026;
2. Aplikasi e-SAKIP REVIU oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada link <https://esr.menpan.go.id/> paling lambat 28 Februari 2026;

3. Aplikasi e-SAKIP pada BATARA dengan **username** Perencanaan Satker pada link <https://batara.mahkamahagung.go.id/> paling lambat 28 Februari 2026. Ketentuan 14 dokumen yang harus diunggah pada aplikasi BATARA, mempedomani surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 24 November 2025;
4. Website masing-masing Satuan Kerja.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

 Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh,
NURSYAM y



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 16292 /SEK/OT1.6/11/2025 Jakarta, 25 November 2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : Empat Berkas
Hal : Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP

Yth. 1. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI:
2. Para Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
3. Para Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;
Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya

Menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK. RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK. RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/ SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029, seluruh unit Eselon I, Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya wajib menyusun dokumen SAKIP yang terdiri dari:

1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi unit kerja yang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tahun 2025.
3. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029.
4. Revisi Rencana Strategis bagi unit kerja yang telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029.
5. Revisi Rencana Kinerja Tahun 2026;
6. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
7. Revisi Rencana Aksi Tahun 2025;
8. Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Triwulan I - III Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
9. Revisi Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Triwulan I - IV Tahun 2025 berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
10. Rencana Kinerja Tahun 2027;


11. Perjanjian Kinerja Tahun 2026;
12. Rencana Aksi Tahun 2026;
13. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024;
14. Laporan Kinerja Tahun 2025 dengan ketentuan: masing-masing Entitas Akuntabilitas Kinerja
 - a) Memuat pernyataan telah direviu pada halaman paling awal sebelum Kata Pengantar dan Formulir Reviu Laporan Kinerja menjadi Lampiran dalam Laporan Kinerja Tahun 2025
 - b) BAB II Perencanaan Kinerja pada Subbab Perjanjian Kinerja perlu disampaikan:
 - Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum terjadi revisi disertai dengan capaian kinerja akumulasi hingga September Tahun 2025.
 - Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
 - c) BAB III Akuntabilitas Kinerja pada Subbab Capaian Kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja perbulan mulai Januari hingga Desember atas sasaran, indikator, dan target pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Hasil pengukuran kinerja perbulan tersebut juga menjadi Lampiran dalam Laporan Kinerja Tahun 2025.
 - d) Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 dijelaskan pada BAB III.

Seluruh Dokumen SAKIP berikut dengan revisinya disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari 2026 melalui:

1. Aplikasi e-SAKIP REVIU oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada link <https://esr.menpan.go.id/>.
2. Aplikasi e-SAKIP pada link <https://batara.mahkamahagung.go.id/>.
3. Website masing-masing Satuan Kerja.

Bila diperlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Rina Alprini (081310606347).

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


Sekretaris Mahkamah Agung RI
Sugiyanto